



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DAMPAK STIMULUS PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN UANG BEREDAR

Deniza Mulia Nita

Analisis Legislatif Ahli Pertama

deniza.nita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 mencapai sekitar Rp9.783,1 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 7,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa likuiditas di perekonomian tetap meningkat, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai sekitar 8 persen. Kenaikan uang beredar ini terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) yang naik sekitar 11 persen dan kuasi-uang yang tumbuh 5,5 persen. Komponen lain yang turut menopang M2 adalah aktiva luar negeri bersih, yang tumbuh sekitar 10,4 persen. Penyaluran kredit juga tetap positif, meskipun melambat menjadi 6,9 persen. Kenaikan likuiditas ini tidak lepas dari efek stimulus pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter, yang ditujukan untuk mendorong konsumsi dan investasi di tengah tantangan ekonomi domestik dan global. Stimulus tersebut termasuk insentif untuk penyaluran kredit, peningkatan ketersediaan uang di sektor perbankan, serta kebijakan yang mendukung permintaan domestik agar ekonomi tetap bergerak.

Kondisi ini menawarkan peluang sekaligus menimbulkan risiko bagi perekonomian. Dari sisi peluang, pertumbuhan uang beredar dapat mempercepat pemulihan ekonomi apabila likuiditas yang meningkat tersalur ke sektor produktif, seperti konsumsi rumah tangga, investasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan kredit produktif. Likuiditas yang tinggi memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit lebih longgar, sehingga sektor usaha yang terdampak sebelumnya bisa memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Dengan demikian, stimulus pemerintah dan kebijakan moneter ekspansif bisa memperkuat dorongan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi domestik.

Di sisi lain, terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah potensi tekanan inflasi. Jika pertumbuhan likuiditas tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, daya beli masyarakat yang meningkat dapat memicu kenaikan harga. Pertumbuhan M1 sebesar 11 persen menunjukkan bahwa uang yang siap dibelanjakan cukup besar, sehingga tanpa pengendalian pasokan barang, risiko inflasi menjadi nyata. Selain itu, meskipun kredit masih tumbuh positif, perlambatan dari 7,2 persen menjadi 6,9 persen menunjukkan bahwa tidak semua likuiditas masuk ke aktivitas produktif. Jika dana yang beredar lebih banyak mengendap atau mengalir ke aset spekulatif, efek positif terhadap ekonomi riil akan terbatas.

Dari perspektif kebijakan, program seperti penghapusan piutang UMKM, misalnya, akan lebih efektif bila didukung dengan likuiditas yang cukup dan penyaluran kredit yang tepat. Namun, kebijakan ekspansi likuiditas yang terlalu agresif tanpa penguatan sisi produksi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, di mana ekonomi menjadi sangat likuid tetapi pertumbuhan riil tidak signifikan. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang tepat menjadi kunci agar stimulus tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kenaikan uang beredar pada Oktober 2025 hingga hampir Rp9.783 triliun menunjukkan adanya dorongan likuiditas yang signifikan akibat stimulus pemerintah. Fenomena ini membuka peluang untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung sektor produktif, namun juga menghadirkan risiko inflasi dan ketidakefisienan penyaluran kredit. Agar dampak peningkatan uang beredar optimal, diperlukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, penguatan sektor produksi, serta pengawasan distribusi likuiditas agar masuk ke sektor riil. Dengan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan uang beredar dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Dalam menghadapi meningkatnya jumlah uang beredar akibat stimulus pemerintah, DPR RI khususnya Komisi XI perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan moneter dan fiskal agar peningkatan likuiditas tidak berujung pada tekanan inflasi. Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat memastikan bahwa desain stimulus dalam APBN diarahkan pada sektor produktif seperti UMKM, bukan belanja yang bersifat konsumtif. Selain itu, fungsi legislasi diperlukan untuk mendorong regulasi yang memperkuat tata kelola penyaluran kredit, transparansi perbankan, serta mitigasi risiko aliran dana ke sektor-sektor nonproduktif. Dengan koordinasi kebijakan yang kuat antara BI, pemerintah, dan DPR RI, peningkatan uang beredar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi secara berkelanjutan.

Sumber

beritasatu.com, 21 November 2025;
cnbcindonesia.com, 21 November 2025;
detik.com, 21 November 2025; dan
viva.co.id, 21 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah.
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*